

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Abdul Latif, *Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009
- Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori dan Penerapannya*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT Gramedia Jakarta, 1984
- \_\_\_\_\_, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008
- Bacsan Mustafa, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2007
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Bambang Widjojanto, *Anti Korupsi dari Gagasan Hingga Pelembagaan*, Kemitraan, Jakarta, 2009
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, 2006

- Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Donal Fariz, dkk., *Kajian Implementasi Aturan Trading in Influence Dalam Hukum Nasional*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2014.
- Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Egi Sudjana, *Republik Tanpa KPK Koruptor Harus Mati*, JP Books, Surabaya, 2008
- Elwi Danil, *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014
- Emerson Yuntho, dkk., *Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2014
- Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK Komisi Pemberantasan Korupsi, Kajian Yuridis Normatif UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 Versi UU Nomor 30 Tahun 2002*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Negeri Padjadjaran, Bandung, tanpa tahun
- \_\_\_\_\_, *Rangkaian Sari Kuliah, Hukum Pidana I*, Universitas Padjadjaran Press, Bandung, 1958
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Stora Grafika, Jakarta, 2002
- Hermien Hadiati Koeswadji, *Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta, 2009
- \_\_\_\_\_, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana*, Diadit Media, Jakarta, 2007
- Ismail Rumadan, Johannes Bratawijaya dan Tri Mulyani, *Penafsiran Hakim Terhadap Pidana Minimum Khusus Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Suatu Kajian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapannya)*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung RI, Mega Mendung, 2013

- Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Persepektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi (Edisi Ringkas)*, Transparansi International Indonesia, Jakarta, 2008.
- Johannes Brata Wijaya, Ismail Rumadan, dan Suhardin, *Makna “Sifat Melawan Hukum” Dalam Perkara Pidana Korupsi (Kajian Tentang Putusan Mahkamah Agung Tahun 2005-2011)*, Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Bogor, 2013.
- Karni, *Ringkasan Tentang Hukum Pidana*, Penerbit dan Balai Buku Indonesia, Jakarta-Surabaya, 1950
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2006
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Luthfi J Kurniawan, *Menyingkap Korupsi di Daerah*, In-Trans, Malang, 2003
- L.J van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004
- Mahrus Ali, *Asas Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2013
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, 1991
- Munir Fuady, *Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- \_\_\_\_\_, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, PT Bina Aksara, Yogyakarta, 1983

M. Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kencana Prenada Media Group, 2012

\_\_\_\_\_, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009

Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran ke Arah Perkembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013

\_\_\_\_\_, *Pengantar Ilmu Hukum, Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012

Philipus M. Hadjon, dkk., *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2012

Philipus M. Hadjon, dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia Introduction to the Indonesian Administrative Law*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2001

Prayitno Iman Santosa, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung, 2015

Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982

P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011

Ridwan, *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014

\_\_\_\_\_, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014



- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981
- Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media, Depok, 2008
- R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, PT Refika Aditama, Bandung, 2006
- Shinta Agustina, dkk., *Obstruction of Justice Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*, Themis Books, Jakarta, 2015
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1982
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2006
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, PT Alumni, Bandung, 2007
- Sunindhia dan Ninik Widityanti, *Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990
- S.F. Marbun, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014
- \_\_\_\_\_, *Hukum Administrasi Negara I*, FH UII Press, Yogyakarta, 2012
- \_\_\_\_\_, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, FH UII Press, 2015
- S.F. Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2011
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana, Edisi Revisi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1982

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2003

Yopie Morya Immanuel Patiro, *Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi*, Keni Media, Bandung, 2012

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Zamzuri, *Tindak Pemerintah (Bestuurshandeling)*, Al-Hikmah, Yogyakarta, 1985

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara RI Tahun 1971 Nomor 19 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2958

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3344

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3874

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4150

Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 137 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4250.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 139 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4899

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 292 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5601

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1267

### **C. RISALAH PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG**

Risalah Rapat Konsinering Rapat Panja RUU Administrasi Pemerintahan Komisi II DPR-RI dengan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Hukum dan HAM RI dan Kementerian Keuangan RI tanggal 1 September 2014, pukul 19.00 WIB di Wisma DPR RI Griya Sabha Kopo Bogor.

Risalah Rapat Panja RUU Administrasi Pemerintahan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Senin 8 September 2014, pukul 14.00 WIB.

### **D. NASKAH AKADEMIK**

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2009

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan*, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jakarta, tanpa tahun

### **E. RANCANGAN UNDANG-UNDANG**

Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan

### **F. PUTUSAN PENGADILAN**

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 742 K/Pid/2007

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 979 K/Pid/2004

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013 dalam Perkara Pengujian Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara terhadap Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

## G. JURNAL DAN MAJALAH

Arsyad Sanusi, Relasi Antara Korupsi dan Kekuasaan, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 2, Juli 2009, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2009

Febri Diansyah, Senjakala Pemberantasan Korupsi, Memangkas Akar Korupsi dari Pengadilan Tipikor, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 2, Juli 2009, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2009

Philipus M Hadjon, Peradilan Tata Usaha Negara dalam Konteks Undang-Undang No. 30 Th. 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Disingkat UU AP), dalam Majalah Hukum *Varia Peradilan*, Tahun XXX No. 358 September 2015, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, 2015

Slamet Suparjoto, UU Administrasi Pemerintahan dan UU Peratun Berbanding Lurus, dalam Majalah Hukum *Varia Peradilan*, Tahun XXX No. 354 Mei 2015, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, 2015

Sufriadi, *Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia*, dalam Jurnal Yuridis, Vol. 1, No. 1, Juni 2014, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Jakarta, 2014

Suharyo, *Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Dalam Era Desentralisasi di Indonesia*, dalam Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 3, Nomor 3 Desember 2014, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2014.

Yulius, Menyelisik Makna Penyalahgunaan Wewenang Dalam Undang-Undang Admnistrasi Pemerintahan Ditinjau dari Optik Hermeneutika Hukum, dalam Majalah Hukum *Varia Peradilan*, Tahun XXXI No. 360 November 2015, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, 2015

## H. KAMUS

A S Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English Sixth Edition*, Oxford University Press, 2003

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008

Martin Basiang, *The Contemporary Law Dictionary (Kamus Hukum Kontemporer) First Edition*, Red & White Publishing, Indonesia, 2009



N.E. Algra, dkk., *Kamus Istilah Hukum Fockema Andrea Belanda –Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1983

## I. RISALAH PERSIDANGAN

Risalah Sidang Perkara Nomor 25/PUU-XIV/2016 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kamis, tanggal, 21 April 2016, Acara mendengarkan keterangan Presiden dan DPR

## J. LAIN-LAIN

Abdus Salam, *Kekuasaan dan Korupsi Praktik Niermoral Pejabat Publik Pasca-Orde Baru*, <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/salam/article/download/459/466>

Chairul Huda, *Perbuatan Melawan Hukum dan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pelaksanaan Kontrak Bioremediasi, Melawan Hukum dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Hukum Pidana*, <http://huda-drchairulhudashmh.blogspot.co.id/2014/03/perbuatan-melawan-hukum-dan.html>

*Corruption Perceptions Index 2015, Perbaiki Penegakan Hukum, Perkuat KPK, Benahi Layanan Publik*, <http://www.ti.or.id/index.php/publication/2016/01/27/corruption-perceptions-index-2015>

David Karel Montolalu, *Peranan Jaksa sebagai Penyidik dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Korupsi*, <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/download/3986/3498>

Julista Mustamu, *Diskresi dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan*, [http://ejournal.unpatti.ac.id/ppr\\_iteminfo\\_lnk.php?id=94](http://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_iteminfo_lnk.php?id=94).

Shinta Agustina, dkk., *Penjelasan Hukum Unsur Melawan Hukum, Penafsiran Melawan Hukum dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, <http://leip.or.id/wp-content/uploads/2016/05/Penjelasan-Hukum-tentang-Unsur-Melawan-Hukum-Hukum-Pidana.pdf>

Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/291/285>,

Transparency International Indonesia, *Transparency International Corruption Perceptions Index 2009*,  
[http://www.ti.or.id/media/documents/2010/11/10/m/a/materialkit\\_cpi2009.pdf](http://www.ti.or.id/media/documents/2010/11/10/m/a/materialkit_cpi2009.pdf)

Uly, *Sosialisasikan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*,  
<http://ekoprasojo.com/2015/01/12/sosialisasikan-undang-undang-administrasi-pemerintahan/>

